

Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Suatu Partai Politik (Study Kasus Psi Kabupaten Garut)

Ita Suryanita Supyan

Universitas Teknologi Digital, ltasuryanita234@gmail.com

Yulianti Maulidiya

Universitas Teknologi Digital, yuliantimaulidiya4@gmail.com

Abstrak

Tujuan_ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan partai di Sekretariat PSI Kabupaten Garut, untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan di Sekretariat PSI kabupaten Garut, untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan di sekretariat PSI Kabupaten Garut sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Desain/Metode_ Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisa data melalui wawancara, observasi kemudian di komparasikan kedalam bentuk narasi berdasarkan gabungan dengan teori-teori yang relevan terkait masalah yang sedang diteliti.

Temuan_ Temuan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah laporan pertanggungjawaban Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Garut belum dapat diakses oleh publik karena hanya dapat dilihat pada saat datang langsung ke kantor sekretariat.

Implikasi_ Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan keuangan di Sekretariat PSI Kabupaten Garut sudah mengikuti standar akuntansi yang berlaku umum, mulai dari pendataan dan pencatatan hingga pelaporan, Ketua Sekretariat bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan keuangan partai, Sekretariat PSI Kabupaten Garut sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partainya, namun belum memenuhi prinsip transparansi.

Originalitas_ penelitian ini adalah berfokus pada pengelolaan keuangan partai politik khususnya di Sekretariat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Garut.

Tipe Penelitian_ Studi Empiris

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi , Partai Politik

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara demokrasi yang dalam pelaksanaan demokrasi memfasilitasi warganya untuk secara bebas menyuarakan pendapat, berkontribusi pada pembentukan entitas nirlaba. Entitas-entitas ini, yang tidak mencari keuntungan, bergantung pada dana publik, pemerintah, dan donatur untuk operasional. Organisasi nirlaba atau non profit berbeda dengan organisasi profit dalam mendapatkan sumber dayanya, yaitu tanpa ekspektasi imbalan finansial yang proporsional, seringkali melalui donasi (Dewi & Suparno, 2022). Sehingga organisasi nirlaba dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan, khususnya bagi partai politik, agar memastikan kepercayaan masyarakat dan representasi aspirasi mereka.

Partai politik di Indonesia, sebagai entitas nirlaba, memainkan peran penting dalam dinamika kebangsaan dan pemerintahan (Fitriyani et al., 2020). Sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2011, partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh warga negara dengan tujuan bersama untuk memajukan kepentingan nasional (Efriyenty, 2022). Organisasi ini melakukan berbagai kegiatan politik dan administratif, yang semuanya memerlukan pendanaan signifikan. Partai politik berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, memastikan bahwa kepentingan masyarakat diwakili dalam pembuatan kebijakan (Djuyandi, 2023). UU Nomor 2 Tahun 2011 pasal 34 A, yang merupakan

revisi dari UU Nomor 2 Tahun 2008, mengharuskan partai politik untuk melaporkan secara teratur penerimaan dan pengeluaran dana kepada BPK, dengan audit tahunan dan laporan yang disampaikan tidak lebih dari satu bulan setelah periode anggaran berakhir (Hermanto, 2021). Transparansi dalam laporan ini memungkinkan masyarakat untuk memahami penggunaan dana, memastikan akuntabilitas dan memperkuat kepercayaan publik. Oleh karena itu, penting bagi partai politik untuk mengadopsi standar akuntansi yang memadai untuk pelaporan keuangan yang jelas dan transparan.

Maraknya kasus korupsi di negara Indonesia yang melibatkan politisi, baik yang ada dilembaga legislatif maupun eksekutif, seperti kasus korupsi yang saat ini sedang menjadi sorotan dan merupakan kasus korupsi terbesar sepanjang pada tahun 2023 yaitu kasus korupsi yang melibatkan Kementerian Pertanian yang menjerat politisi sekaligus eksekutif Syahrul Yasin Limpo (www.cnbcindonesia.com), menjadi catatan tersendiri untuk melihat kembali bagaimana pengelolaan keuangan suatu partai politik.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan di Sekretariat Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Garut".

II. Kajian Teori Akuntabilitas

Menurut Rohman (2022), akuntabilitas merupakan prinsip yang memberikan jaminan bahwa segala kegiatan di dalam pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pemerintah diwajibkan menjelaskan tindakan dan kinerjanya kepada pihak yang memiliki kewenangan. Kustiwi et al. (2023) menambahkan bahwa akuntabilitas publik adalah prinsip tata kelola pemerintahan yang bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Peningkatan akuntabilitas pemerintah di Indonesia dianggap strategis karena berdampak pada good governance, mencakup bidang politik dan ekonomi.

Hermanto (2021) mengidentifikasi beberapa ciri akuntabilitas, seperti keutuhan dan keseluruhan dalam tanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi instansi, mencakup aspek integritas keuangan, ekonomis, efisien, dan prosedur, serta membangun sistem informasi yang handal. Sementara itu, fungsi akuntabilitas, menurut Kiri & Handayani (2023), mencakup penyampaian tujuan dan sasaran program, pengukuran pencapaian tujuan organisasi, fungsi kontrol, dan menyajikan informasi akurat untuk pengambilan keputusan pemimpin.

Roni (2020) membagi akuntabilitas menjadi dua macam, yaitu vertikal dan horizontal. Akuntabilitas vertikal melibatkan pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal melibatkan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dalam konteks akuntabilitas pada tingkatan individu, kelompok, organisasi, dan stakeholder, terdapat tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tujuan. Dengan demikian, akuntabilitas bukan hanya kewajiban pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga mencakup tanggung jawab individu, kelompok, dan organisasi dalam mencapai kinerja yang diharapkan.

Menurut Jamaluddin Majid dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Sektor Publik (2019) dikatakan bahwa sebuah Organisasi Nirlaba dapat di kategorikan akuntabel apalagi terdapat beberapa hal berikut:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan
2. Laporan aktivitas serta
3. Laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan
4. Catatan atas laporan keuangan. Laporan Posisi Keuangan / Neraca

Transparansi

Transparansi, dalam konteks ini, merujuk pada keterbukaan dan kejelasan suatu topik atau masalah. Konsep ini mencerminkan tindakan atau sikap yang menunjukkan keterbukaan dan kebenaran, seiring dengan istilah dasar 'transparan'. Dalam konteks politik, transparansi menekankan

keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah, dengan keyakinan bahwa akses publik terhadap informasi pemerintahan dapat membangun kepercayaan masyarakat. Prinsip ini menuntut bahwa semua aspek keputusan dan kebijakan pemerintah harus terbuka untuk diketahui oleh masyarakat umum, memungkinkan mereka untuk memantau, menganalisis, dan menilai kinerja pemerintah. Dengan demikian, transparansi bukan hanya sebuah konsep, tetapi juga merupakan sarana pengawasan awal yang diperlukan untuk menjaga akuntabilitas dan mengurangi potensi manipulasi dalam tindakan organisasi publik.

Partai Politik

Partai Politik, dalam konteks politik Indonesia, merupakan suatu entitas terorganisir yang anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang serupa, dengan tujuan utama memperoleh kekuasaan politik dan merebut posisi politik secara konstitusional. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 mendefinisikan Partai Politik sebagai organisasi bersifat nasional, dibentuk oleh warga negara Indonesia secara sukarela, dengan tujuan memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara. Fungsi partai politik melibatkan peran sebagai sarana komunikasi, sosialisasi, rekrutmen politik, serta peredam dan pengatur konflik dalam masyarakat. Partai politik memiliki ciri-ciri seperti berakar dalam masyarakat lokal, melaksanakan kegiatan secara terus menerus, berusaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan, serta ikut serta dalam pemilihan umum.

Pengelolaan keuangan partai politik juga menjadi aspek krusial. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 mengatur bahwa dana partai politik dapat berasal dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari APBN/APBD. Namun, kenyataannya, iuran anggota kurang efektif sebagai sumber dana, dan partai politik cenderung mengandalkan sumbangan individu atau perusahaan untuk menjalankan kegiatan politiknya. Meskipun ada batasan jumlah sumbangan, prakteknya sering kali melampaui batas yang ditetapkan. Di beberapa negara, seperti yang dijelaskan oleh Arfiani & Syofyan (2023), sumber keuangan partai politik dapat melibatkan iuran anggota, sumbangan perusahaan, subsidi dana publik, fasilitas publik, sumbangan individu, sumbangan organisasi buruh dan sejenis, serta sumbangan dari pihak asing (Arfiani & Syofyan, 2023).

III. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial secara mendalam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam dan memahami konteks subjek penelitian, bukan hanya mengidentifikasi hubungan sebab-akibat. Penelitian deskriptif sebagai metode yang menggambarkan karakteristik objek berdasarkan data yang diperoleh (Sugiyono, 2020). Ini dilakukan melalui survei yang cermat, observasi yang teliti, wawancara mendalam, dan studi kasus yang detail, memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa dan kompleksitas subjek.

Objek penelitian ini adalah pelaporan keuangan sekretariat Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Garut. Penelitian bertujuan untuk mengungkap dan menawarkan solusi terhadap tantangan yang dihadapi dalam transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Dengan memahami praktik pelaporan saat ini, penelitian ini berusaha mengidentifikasi area potensial untuk perbaikan dan inovasi dalam proses pelaporan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pentingnya pemilihan metode pengumpulan data yang tepat untuk memastikan proses analisis data yang akurat (Sugiyono, 2020). Wawancara dilakukan untuk memperoleh perspektif mendalam dari individu yang terlibat langsung dalam proses pelaporan keuangan. Observasi memungkinkan peneliti untuk menyaksikan perilaku dan interaksi dalam konteks nyata, sementara dokumentasi memberikan akses ke catatan resmi dan materi tertulis yang relevan dengan pelaporan keuangan. Teknik ini dipilih karena kemampuannya untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan multifaset dari subjek penelitian.

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan data secara sistematis dan kontekstual. Proses analisis ini mencakup identifikasi

pola, tema, dan kategori dalam data, serta perbandingan temuan dengan teori yang ada. Tujuannya adalah untuk membangun pemahaman yang kuat tentang akuntabilitas dan praktik pengelolaan keuangan yang sedang diteliti.

Prosedur penelitian dirancang untuk memastikan bahwa setiap langkah dapat direproduksi oleh peneliti lain. Lokasi penelitian dilakukan di Sekretariat Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Garut yang berlokasi di Jl. Muara, Muara Sanding, Kec. Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44119. Penelitian ini di mulai pada tanggal 10 November sampai dengan 10 Januari 2024. Responden yang dipilih adalah individu yang memegang posisi kunci dalam organisasi, yang pengetahuannya dianggap penting untuk penelitian ini, meliputi Ketua, Bendahara, dan Sekretaris sekretariat tersebut.

IV. Hasil Dan Pembahasan

Pengelolaan Keuangan Partai Di Sekretariat Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Garut

Ketua Sekretariat Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Garut menekankan bahwa pengelolaan keuangan partai meliputi penetapan anggaran, pencatatan transaksi, dan pemantauan anggaran secara rutin. Setiap transaksi diawasi untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan partai. Sistem pertanggungjawaban keuangan diterapkan melalui pemantauan ketat, pelaporan berkala, dan audit internal untuk menjaga integritas keuangan partai.

Berikut adalah kutipan wawancara dengan Ketua Sekretariat DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Garut: "Saya, sebagai Ketua sekretariat DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Garut, memiliki tanggung jawab utama terhadap pengelolaan keuangan di sekretariat. Selain itu, tim keuangan di bawah kepemimpinan saya bertugas untuk melaksanakan proses pengelolaan keuangan dengan baik."

Sedangkan dalam hal pengelolaan keuangan, peran bendahara sangat penting. Dalam wawancara dengan bendahara Partai Solidaritas Indonesia menyampaikan perannya dalam memastikan kepatuhan terhadap prosedur keuangan, penanganan alokasi dana, dan pemantauan ketat terhadap realisasi anggaran: "Saya, sebagai Bendahara sekretariat DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Garut, memiliki peran kunci dalam memastikan kepatuhan terhadap prosedur keuangan dan melaksanakan tugas-tugas terkait manajemen keuangan dengan cermat."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Sekretariat DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Garut, disampaikan pula bahwa sekretaris menunjukkan peran penting dalam pengelolaan administratif dan koordinasi. Proses pengelolaan keuangan mencakup pencatatan transaksi, pengarsipan dokumen, dan kerjasama dengan Bendahara untuk menyusun laporan keuangan: "Sebagai Sekretaris sekretariat DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Garut, peran saya terkait pengelolaan keuangan melibatkan koordinasi dengan tim keuangan untuk memastikan kelancaran proses administratif."

Sekretariat Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Garut berkomitmen pada transparansi dan akuntabilitas keuangan. Ketua Sekretariat bertanggung jawab atas penetapan anggaran, pencatatan transaksi, dan pemantauan anggaran. Tim keuangan melakukan pengawasan ketat untuk mematuhi kebijakan partai, dengan sistem pertanggungjawaban yang melibatkan pemantauan, pelaporan, dan audit internal yang rutin.

Peran Bendahara sangat penting dalam memastikan kepatuhan terhadap prosedur keuangan, mengelola alokasi dana, dan memantau anggaran. Sementara itu, Sekretaris Sekretariat memiliki tugas koordinasi administratif, pencatatan transaksi, pengarsipan dokumen, dan bekerja sama dengan Bendahara untuk menyusun laporan keuangan, yang menunjukkan kerja sama tim yang efektif dalam menjaga proses administratif dan keuangan.

Pengelolaan keuangan Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Garut menunjukkan penerapan prinsip akuntansi yang solid serta dedikasi terhadap transparansi dan akuntabilitas. Tujuannya adalah untuk memastikan penggunaan dana partai sesuai tujuan yang telah ditetapkan dan untuk menjamin keterbukaan informasi keuangan kepada semua pihak yang berkepentingan dan publik (Kustiwi et al.,

2023). Pengelolaan keuangan di Sekretariat Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Garut mengadopsi prinsip-prinsip akuntansi dan manajemen keuangan yang solid, dengan sistem pengawasan internal yang dirancang untuk mengurangi risiko keuangan dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan partai. Ini sesuai dengan teori pengawasan dan kontrol internal yang dijelaskan oleh Hery dalam "Teori Akuntansi: Pendekatan Konsep dan Analisis 2023".

Pengelolaan keuangan di Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Garut mengikuti prinsip manajemen keuangan yang efektif, dengan penetapan anggaran, pencatatan transaksi harian, dan pemantauan anggaran yang ketat. Kepemimpinan Ketua Sekretariat memastikan integritas dan kepatuhan, sejalan dengan teori kepemimpinan manajemen keuangan. "Komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas mencerminkan teori organisasi," mendukung praktik keuangan yang berkelanjutan dan integritas dalam penggunaan dana partai (Pratiwi et al., 2020).

Keseluruhan pendekatan ini menunjukkan bahwa Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Garut secara praktis senantiasa memastikan pengelolaan keuangan yang efektif dan berdasarkan standar akuntansi dan manajemen keuangan yang berlaku umum.

Yang Bertanggung Jawab Terhadap Pengelolaan Keuangan Sekretariat Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Garut

Dalam kedua wawancara, baik dengan Ketua Sekretariat maupun dengan Bendahara sekretariat Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Garut menegaskan peran kunci yang mereka mainkan dalam pengelolaan keuangan partai tersebut.

Berikut kutipan yang menunjukkan tanggung jawab Ketua Sekretariat: "Saya, sebagai Ketua sekretariat DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Garut, memiliki tanggung jawab utama terhadap pengelolaan keuangan di sekretariat. Selain itu, tim keuangan di bawah kepemimpinan saya bertugas untuk melaksanakan proses pengelolaan keuangan dengan baik." (Ketua Sekretariat)

Sementara itu, Bendahara sekretariat juga menyoroti perannya dalam memastikan kepatuhan terhadap prosedur keuangan dan manajemen keuangan yang cermat: "Saya, sebagai Bendahara sekretariat DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Garut, memiliki peran kunci dalam memastikan kepatuhan terhadap prosedur keuangan dan melaksanakan tugas-tugas terkait manajemen keuangan dengan cermat." (Bendahara Sekretariat)

Tanggung jawab utama dalam pengelolaan keuangan Sekretariat Partai Solidaritas Indonesia di Kabupaten Garut berada pada Ketua Sekretariat, yang mengoordinasikan tim keuangan. Bendahara sekretariat memainkan peran krusial dalam menjaga keteraturan dan keakuratan pengelolaan dana partai, serta memastikan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan.

Analisis tanggung jawab pengelolaan keuangan Sekretariat Partai Solidaritas Indonesia di Kabupaten Garut menunjukkan bahwa manajemen keuangan yang efektif adalah kunci untuk operasional partai yang lancar dan pemenuhan kewajiban keuangan. Tanggung jawab ini terutama berada pada Ketua dan Bendahara Sekretariat, yang memastikan bahwa semua prosedur keuangan diikuti dengan ketat untuk menjaga integritas dan transparansi organisasi politik tersebut.

Ketua Sekretariat Partai Solidaritas Indonesia di Kabupaten Garut memiliki tanggung jawab utama dalam pengelolaan keuangan, termasuk pengambilan keputusan dan pengawasan tim keuangan, dengan fokus pada integritas dan transparansi.

Peran Bendahara Sekretariat sangat penting dalam penelitian ini, dengan fokus pada kepatuhan terhadap prosedur keuangan dan manajemen keuangan yang teliti. Bendahara bertanggung jawab atas kontrol dan pengawasan keuangan, yang esensial untuk mengurangi risiko dalam pengelolaan dana partai dan memastikan pelaporan keuangan yang akurat dan teratur.

Kolaborasi antara Ketua Sekretariat dan tim keuangan sangat krusial dalam pengelolaan keuangan yang efektif. Tim keuangan yang efisien mendukung pelaksanaan kebijakan dan peraturan keuangan, memastikan proses pengelolaan keuangan berjalan dengan baik.

Keterlibatan aktif dan koordinasi antara Ketua Sekretariat dan tim keuangan adalah kunci untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan partai (Mustanir, 2023). Sesuai dengan teori manajemen keuangan, kepemimpinan yang efektif dan sistem pengawasan yang kuat sangat penting untuk memastikan keberlanjutan finansial organisasi (Roni, 2020).

Penelitian ini menggarisbawahi peran penting Ketua Sekretariat dan Bendahara dalam memastikan pengelolaan keuangan yang baik di Sekretariat Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Garut. Kolaborasi efektif antara mereka dan tim keuangan menjamin integritas, transparansi, dan kepatuhan dalam pengelolaan dana, yang vital untuk operasional partai politik di tingkat lokal (Setiawan, 2023).

Apakah Pengelolaan Keuangan di Sekretariat Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Garut Sudah Menerapkan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi?

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh data bahwa sekretariat PSI Kabupaten Garut telah membuat beberapa laporan pertanggungjawaban seperti laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan Catatan atas laporan keuangan.

Hasil wawancara dengan bendahara sekretariat PSI Kabupaten Garut

Sebagai Bendahara, saya berperan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan laporan tersebut dibuat untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai.

Bedasarkan hasil wawancara dengan bendahara sekretariat PSI kabupaten Garut bagi khalayak umum yang ingin melihat laporan pertanggungjawaban bisa datang langsung ke kantor sekretariat.

Hasil wawancara dengan bendahara sekretariat PSI Kabupaten Garut

Saya aktif mengkomunikasikan informasi keuangan kepada anggota partai melalui pertemuan dan surat kabar internal. Saya memastikan bahwa anggota partai dapat mengakses informasi keuangan dengan mudah. Meskipun khalayak umum belum dapat dengan mudah mengakses beberapa laporan pertanggungjawaban, akan tetapi saya bersama tim juga mendukung inisiatif untuk melibatkan publik dalam pemantauan keuangan dengan memberikan informasi yang jelas dan mendukung akses terbuka terhadap laporan keuangan partai.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa sekretariat PSI kabupaten Garut sudah memenuhi prinsip akuntabilitas hal ini sesuai dengan teori mengenai indikator akuntabilitas yang dikemukakan oleh Jamaluddin majid dalam bukunya yang berjudul akuntabilitas sektor publik (2019) dimana organisasi nirlaba harus membuat laporan pertanggungjawaban yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan Catatan atas laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang di ungkapkan oleh bendahara.

Sedangkan dalam prinsip transparansi PSI Kabupaten Garut belum bisa di katakan transparan karena tidak sesuai dengan pernyataan yang di kemukakan oleh Muhtar Said dalam jurnal nya yang berjudul Tranparansi Keuangan Dalam Partai Politik (2020) yaitu dikatakan transparan apabila memenuhi aspek keterbukaan. Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan yang di kemukakan oleh bendahara sekretariat PSI Kabupaten Garut. Dimana khalayak umum hanya dapat datang langsung ke kantor sekretariat apabila ingin melihat laporan pertanggungjawaban.

V. Penutup

Pengelolaan keuangan di Sekretariat Partai PSI Kabupaten Garut dapat dikatakan baik, dimulai dari penetapan anggaran, pencatatan transaksi, pemantauan anggaran secara rutin, pemantauan setiap transaksi memastikan kepatuhan terhadap kebijakan partai, adanya pelaporan secara berkala hingga audit internal, semua proses telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai prosedur. Sedangkan tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan Sekretariat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Garut dipegang penuh oleh Ketua Sekretariat berkolaborasi dengan Bendahara Sekretariat demi terciptanya integritas dan kepatuhan. Untuk pengelolaan keuangan sekretariat PSI Kabupaten Garut sudah memenuhi prinsip akuntabilitas namun belum memenuhi prinsip transparansi. Karena laporan yang dibuat tidak dapat dilihat secara online oleh masyarakat luas. Sehingga berdasarkan penelitian ini diharapkan PSI Kabupaten Garut dapat menyampaikan secara terbuka laporan pertanggungjawaban yang selama ini telah dibuat agar dapat menciptakan transparansi keterbukaan informasi tentang keuangan partai dan membangun kepercayaan untuk integritas partai politik.

Daftar Pustaka

- Andini, I. Y., Arfiyanto, D., & AR, M. M. S. (2020). Pengungkapan Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik. *PERFORMANCE: Jurnal Bisnis & Akuntansi*, 10(1), 63-76.
- Arfiani, A., & Syofyan, S. (2023). Menakar Transparansi Keuangan Partai Politik Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum. *Nagari Law Review*, 7(1), 107-116.
- Dewi, R. C., & Suparno, S. (2022). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 78-90.
- Dian Efriyenty, S. E., & Ak, M. (2022). *Teori Akuntansi*. CV Batam Publisher.
- Djuyandi, Y. (2023). *Pengantar Ilmu Politik*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Fitriyani, L. Y., Marita, M., Windyastuti, W., & Absor, M. (2020). Analisis pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan peran perangkat desa terhadap pengelolaan dana desa. *Eksos Lppm*, 2(2), 132-139.
- Hermanto, F. Y. (2021). Manajemen Arsip Dinamis Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Sekolah. *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran (JPAP)*, 9(3), 321-331.
- Hery, S. E. (2023). *Teori akuntansi: Pendekatan konsep dan analisis*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hoesada, J. (2022). *Teori Akuntansi: dalam Hampiran Historiografis Taksonomis*. Penerbit Andi.
- Kiri, S. H. P., & Handayani, N. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Publik Serta Fungsi Pemeriksaan Inten Terhadap Kinerja Pemerintah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(8).
- Kustiwi, I. A., Yuliatin, B., Istiqomah, D. R., Satriwibowo, N. W., Febriana, A., & Iradati, G. C. R. (2023). Pelatihan Dan Pendampingan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Seni Dan Kirab Budaya Pada Desa Cupak Jombang. In *Prosiding Seminar Nasional Manajemen dan Ekonomi (Vol. 2, No. 1, pp. 38-49)*.
- Majid. Jamaludin. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Sulawesi Selatan: Penerbit Pusaka Almaida
- Mustanir, A. (2023). Bab 2 Ciri-Ciri Sistem Politik. *Sistem Politik Indonesia*, 15.
- Pratiwi, I., Rahayu, S., & Triyanto, T. (2020). Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda. *Jurnal PPKn: Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(2), 130-138.
- Roni, I. (2020). Implementasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Apbdesa Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Keting Kecamatan Jombang Kabupaten Jember). *Counting: Journal of Accounting*, 3(2), 89-94.
- Setiawan, N. (2023). Urgensi Pengelolaan Keuangan Masjid dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Pencegahan terhadap Fraud. *Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 21-32.
- Sugiyono, 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sule, B. (2021). How accountable and transparent is the African democracy? Reviewing political party financing and regulations. *African Social Science and Humanities Journal*, 2(3), 168-184.
- Yulan, P., & Putra, I. S. (2021). Strategi Penguatan Sistem Pengendalian Internal Untuk Menghindari Terjadinya Fraud Pada Kas Perusahaan. *Jurnal Penelitian Teori dan Terapan Akuntansi (PETA)*, 6(2), 181-191.